

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Azmi Fendri. 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta.

Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta.

Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta.

M. Hadjon Philipus. dkk. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

Miriam Budiharjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Salim HS. 2007. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

_____. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika: Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2017. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia UI Press.

Sukanda Husin. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Sunarno Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

_____. 2003. *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*. Airlangga University Press: Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Minamata Convention On Mercury* (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri).

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Paparan Merkuri Tahun 2016-2020.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 472 Tahun 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya bagi Kesehatan.

Internet

<<https://media.neliti.com/media/publications/26601-ID-implikasi-hukum-terkait-pertambangan-rakyat-dalam-bidang-minerba-di-indonesia.pdf>> [9/01/19]

<<http://id.m.wikipedia.org>> [3/4/19]

<<http://Solokkab.go.id>> [3/4/19]

<<https://elib.unikom.ac.id>> [27/5/19]

<<https://jdih.mahkamahagung.go.id>> [10/7/19]

